INDEF

GEJOLAK GLOBAL DAN TEKANAN EKONOMI DOMESTIK:

Menakar Ruang Kebijakan dan Sumber Pertumbuhan Indonesia 2027



M. Rizal Taufikurahman

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan INDEF

Disampaikan pada Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2027. Dengan tema Gejolak Global dan Tekanan Ekonomi Domestik: Menakar Ruang Kebijakan dan Sumber Pertumbuhan Indonesia 2027. Penyelenggara Kolaborasi INDEF dengan IDX Channel.

Bursa Efek Indonesia, 25 November 2026

RESENSI BUKU: PROYEKSI EKONOMI INDONESIA 2027



DAFTAR ISI

BAB I	Perkembangan Ekonomi Global dan Domestik
BAB II	Sumber-Sumber Pertumbuhan Baru
BAB III	Tantangan Sektor Fiskal dan Ruang APBN
BAB IV	Dominasi Fiskal dan Kredibilitas Ekonomi
BAB V	Tantangan Moneter, Perbankan, dan Pasar Modal
BAB VI	Ketahanan Sektor Riil dan Transformasi Struktural
BAB VII	Evaluasi Ekonomi 2026 dan Proyeksi Ekonomi 2027

Buku ini menelaah bagaimana gejolak global dan beban bunga utang membatasi ruang kebijakan, sekaligus memetakan sumber pertumbuhan baru untuk memperkuat ekonomi Indonesia.

Guncangan Energi Global Mendorong Inflasi Naik dan Menekan Rupiah

Kenaikan Harga Komoditas Dunia, Oktober 2026 (% yoy)

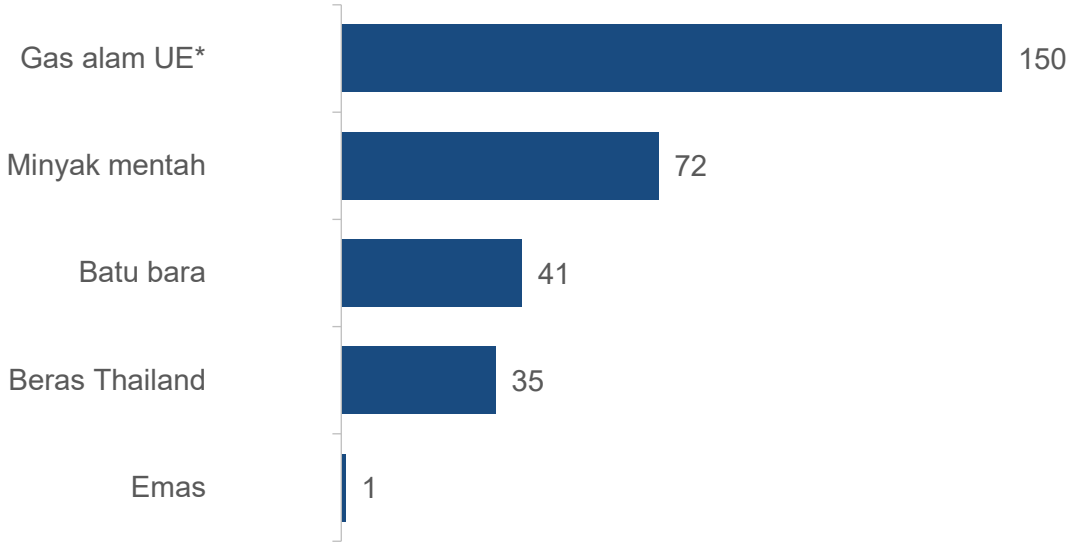

Perubahan Nilai Tukar terhadap US$, TW III vs TW II 2026 (%)

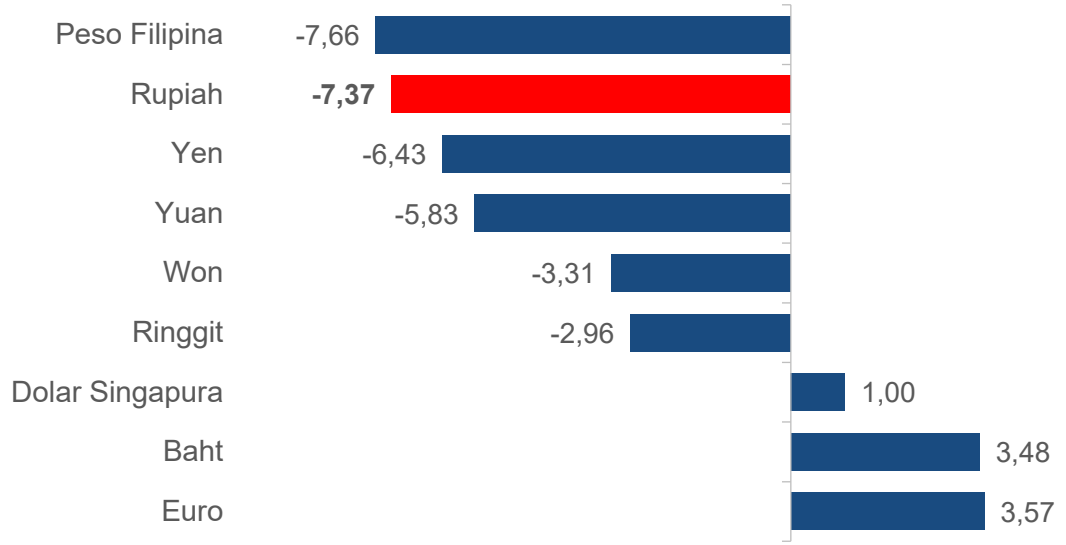

- **Penutupan Selat Hormuz mengerek harga minyak mentah ke US$108,5 per barel pada Oktober 2026**, naik 72% (yoy), sementara kenaikan merembet ke pangan seperti beras. Bagi Indonesia sebagai importir neto minyak, menjadi beban lewat harga sekaligus subsidi energi.
- **Inflasi energi naik tajam di AS (20,4%), UE (18,9%), dan China (16,6%), disertai kenaikan harga produsen**. Bank sentral utama kembali menaikkan bunga 25–50 bps pada triwulan III 2026, dan investor beralih ke aset dolar AS (DXY 102).
- **Rupiah termasuk mata uang yang paling tertekan, melemah 7,37% dalam satu triwulan.** BI menahan BI-Rate di 5,75% setelah menaikkannya 100 bps, sehingga ruang pelonggaran untuk menopang pertumbuhan menjadi sangat terbatas.

Sumber: Bank Dunia, BI, CEIC (diolah)

Ekonomi Tumbuh 5,47%, tetapi Daya Beli dan Kesejahteraan Masih Tertinggal

Rata-rata Saldo Rekening di Bawah Rp100 Juta (Juta Rp)

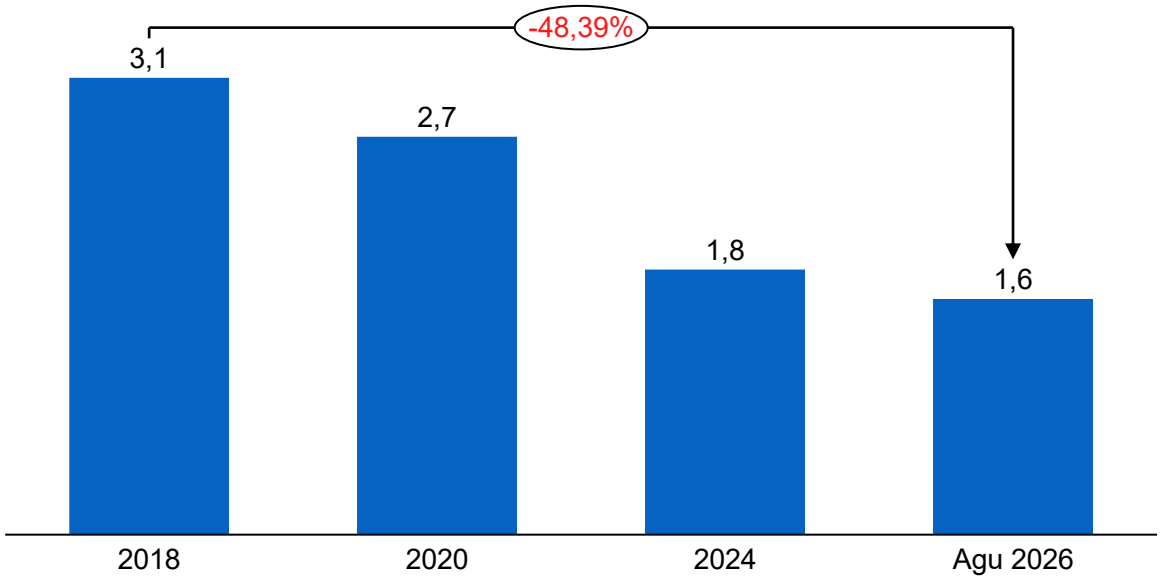

Jumlah Kelas Menengah (Juta Orang)

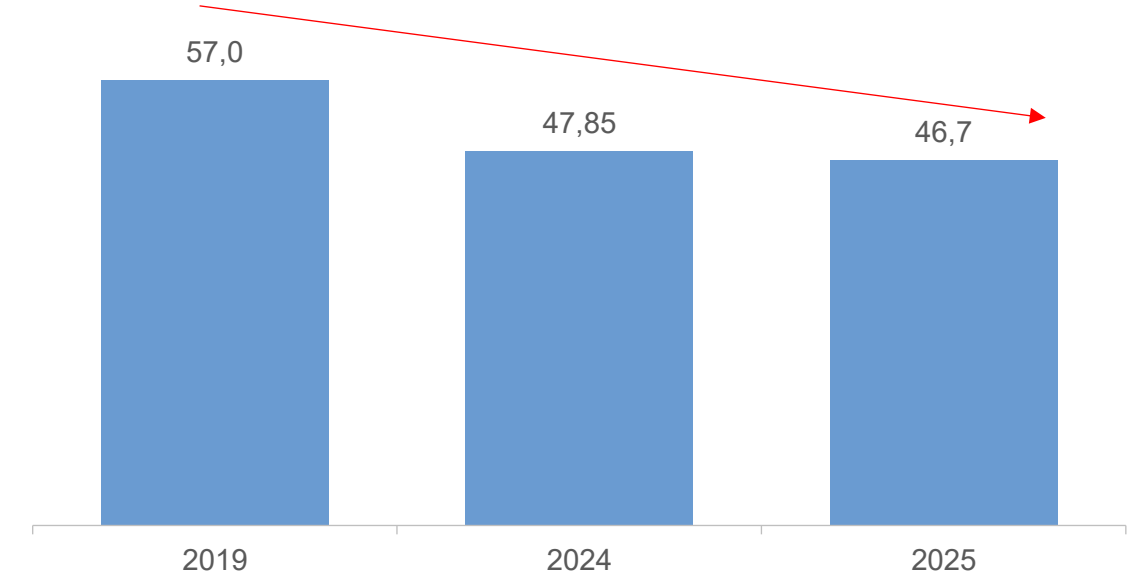

- **Pertumbuhan triwulan III 2026 mencapai 5,47% (yoy) dan melampaui target APBN,** tetapi konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 5,04%. Penopang terbesar justru konsumsi pemerintah (8,95%), sementara inflasi inti dan pangan yang persisten perlahan menggerus daya beli.
- **Bantalan rumah tangga menipis.** Dimana saldo rata-rata simpanan di bawah Rp100 juta turun dari Rp3,1 juta (2018) menjadi Rp1,6 juta per rekening (Agustus 2026), dan kelas menengah menyusut ke 46,7 juta orang. Gejala “makan tabungan” muncul ketika pendapatan tak lagi menutup kebutuhan sehari-hari.
- **Surplus dagang Januari–September 2026 menyempit** menjadi sekitar US$10,6 miliar karena impor melonjak, sehingga pasokan valas berkurang. TPT dan kemiskinan hanya turun tipis: pertumbuhan belum diterjemahkan menjadi pekerjaan berkualitas dan pemerataan.

Sumber: BPS, LPS (diolah)

Empat *Game Changer:* Kualitas SDM, Infrastruktur, Inovasi, dan Institusi

Potensi Sektor Game Changer			
Ekonomi Digital	**Ekonomi Kreatif**	**Pariwisata**	**Ekonomi Hijau**
8,35%	**7,38%**	**15,39 juta**	**6–7%**
Pertumbuhan sektor infokom 2025; merchant QRIS naik dari 12 juta menjadi 42,75 juta	Pangsa terhadap PDB 2025; investasi naik dari Rp89,37 T menjadi Rp183,01 T	Wisman 2025, tetapi belanja per wisman turun ke US$1.267 per kunjungan	Kontribusi terhadap PDB; potensi 1,2 juta green jobs pada 2045

- Indonesia perlu beralih dari resource growth ke knowledge growth untuk keluar dari pertumbuhan sekitar 5%, sebelum bonus demografi berakhir pada 2040. Ketergantungan pada konsumsi domestik dan ekspor komoditas primer membuat pertumbuhan rentan terhadap gejolak global.
- Keempat sektor menunjukkan kemajuan, tetapi belum optimal: belanja per wisatawan asing justru turun, sementara indeks pilar ekonomi dari ekonomi hijau melandai sejak 2020. Manfaat digitalisasi juga bergantung pada kesiapan SDM untuk menangkap peluangnya.
- Keberhasilannya ditentukan empat prioritas: talenta digital dan kreatif, infrastruktur generasi baru (pusat data, broadband, energi bersih), ekosistem riset yang menyatukan pemerintah, universitas, dan industri, serta transformasi institusi yang menjamin kepastian regulasi dan iklim investasi.

Sumber: BPS, BI, Bappenas, berbagai sumber (diolah)

Penerimaan Pajak Tidak Ikut Terangkat, Belanja Didominasi Pos yang Besar

Tax Ratio Indonesia (% PDB)

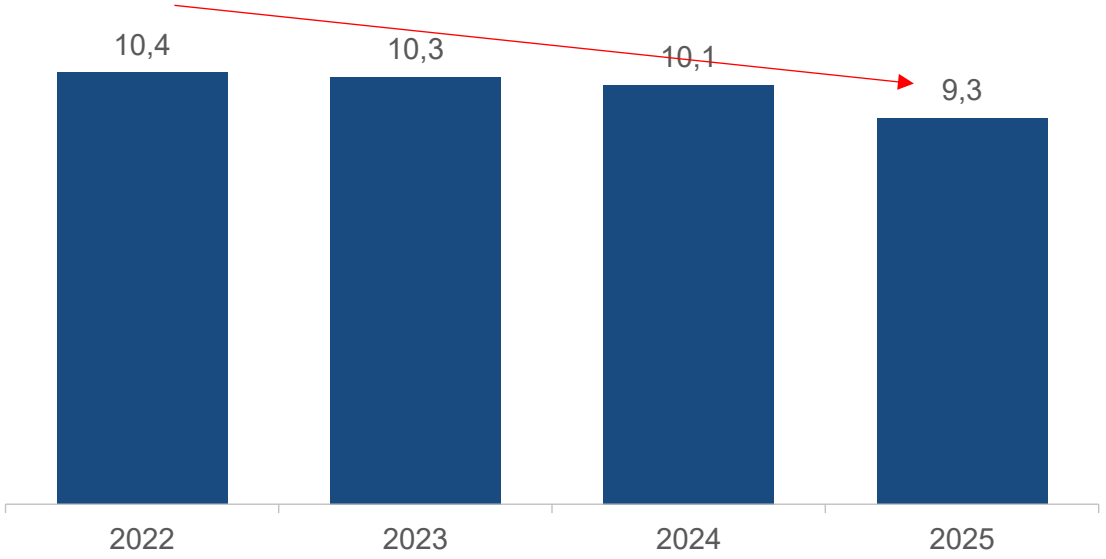

Pembayaran Bunga Utang vs Belanja Modal (Rp Triliun)

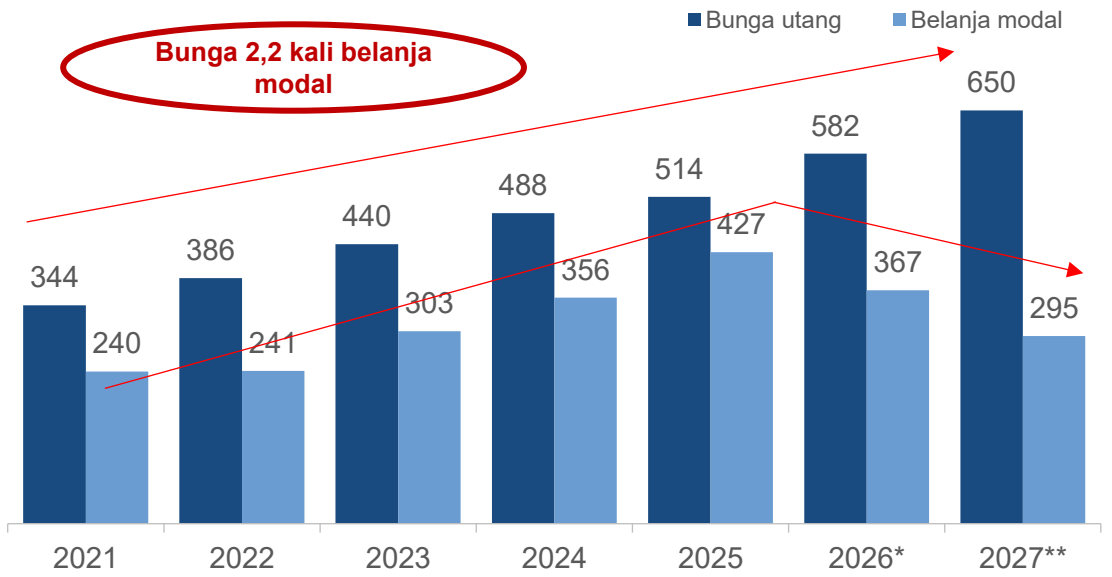

- **Tax ratio turun** dari 10,4% (2022) menjadi 9,3% (2025) meski ekonomi tumbuh di atas 5%, dan shortfall pajak 2025 mencapai sekitar Rp273 triliun. Penerimaan bertumpu pada PPh yang rentan terhadap harga komoditas, sementara banyak aktivitas ekonomi belum terjangkau administrasi pajak.
- **Bunga utang naik** ke Rp650,3 triliun pada RAPBN 2027, setara 2,2 kali belanja modal yang justru dipangkas ke Rp295,2 triliun (7,2% belanja, terendah sejak 2021). Saat ruang fiskal tertekan, belanja modal menjadi pos paling mudah dipotong, sedangkan bunga tidak bisa ditunda.
- **Program prioritas menggeser beban tanpa menambah ruang fiskal,** seperti sebagian anggaran MBG dicatat sebagai anggaran pendidikan, angsuran Kopdes dibayar dari Dana Desa, dan Transfer ke Daerah turun 17,9% pada 2026 dengan DBH serta DAK Fisik terpangkas paling dalam.

Sumber: Kemenkeu, BPS, LKPP (diolah)

Defisit Ditarget Turun, tetapi Beban Jatuh Tempo SBN Memuncak pada 2027

SBN Jatuh Tempo 2027–2031 (Rp Triliun)

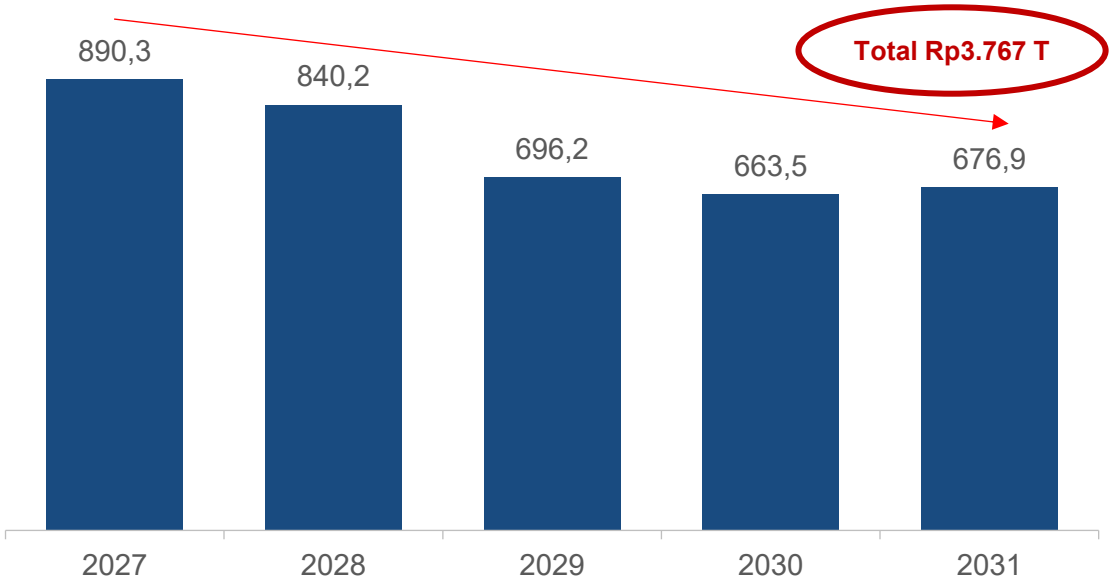

Transfer ke Daerah per Komponen (Rp Triliun)

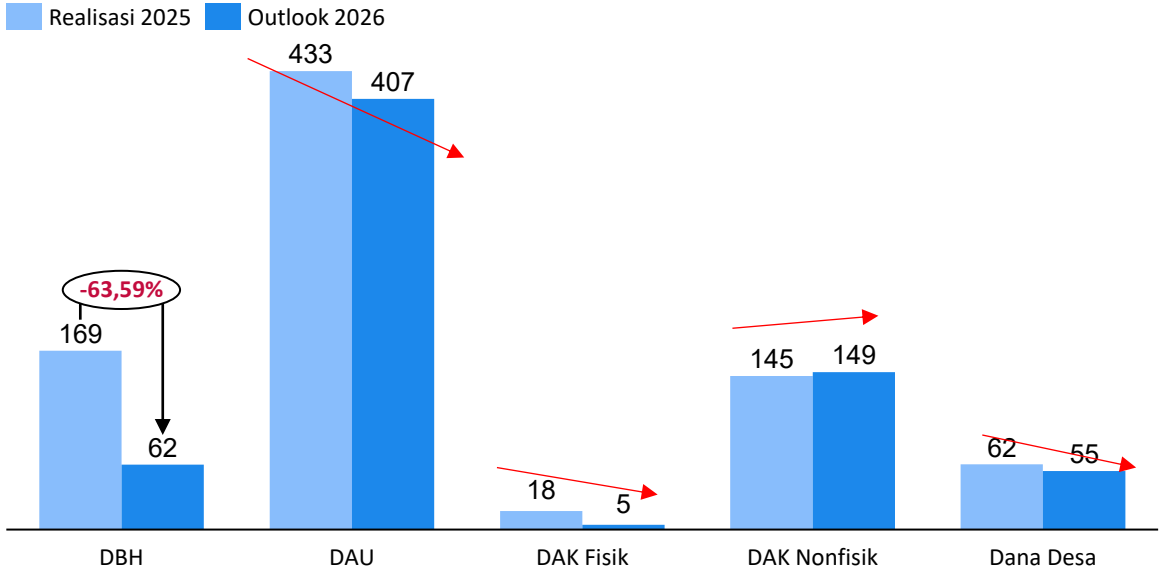

- **Defisit 2027 ditargetkan Rp671,2 triliun (2,4% PDB), turun dari sekitar 2,9% pada outlook 2026**. Target ini agresif karena belanja tetap ekspansif, sehingga bila penerimaan meleset, tekanan akan berpindah ke pembiayaan utang.
- **Jatuh tempo SBN memuncak Rp890,3 triliun pada 2027 dan mencapai sekitar Rp3.767 triliun selama 2027–2031**. Rasio utang sudah 41,3% PDB (Juli 2026), yield 10 tahun sempat 7,32%, dan investor asing beralih ke tenor pendek; tekanan ini bersifat spesifik Indonesia, bukan sekadar global.
- **Alternatif seperti SAL, KPBU, BLU, dan Danantara hanya pelengkap**, bukan pengganti utang. Di saat yang sama, daerah menanggung penyesuaian lewat pemangkasan DBH dan DAK Fisik yang membiayai infrastruktur layanan dasar.

Sumber: Kemenkeu, Bloomberg, CEIC (diolah)

Bunga Menyerap Hampir Seperlima Pendapatan, Dukungan BI Kian Meluas

Pembayaran Bunga terhadap Pendapatan Negara (%)

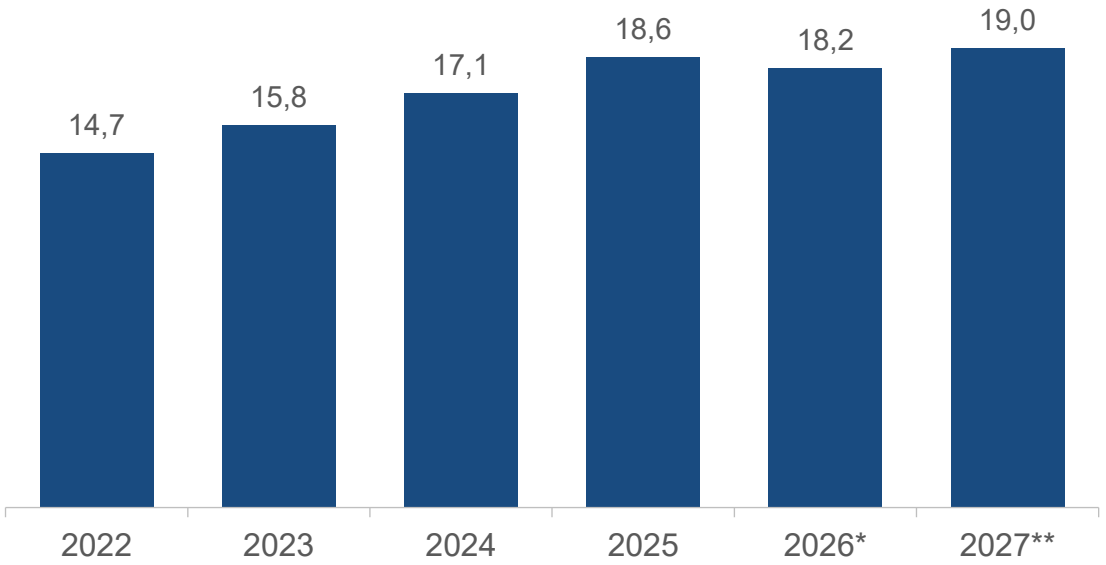

Empat Saluran Keterlibatan BI

Pembelian SBN

Rp332,14 T sepanjang 2025

Pertukaran utang

Rp173,4 T SBN milik BI

Burden sharing

Tambahan bunga untuk FLPP dan KDMP

Penempatan kas

Rp200 T di lima bank BUMN

- **Hampir Rp19 dari setiap Rp100 pendapatan negara sudah terikat untuk bunga**, dan kebutuhan pembiayaan bruto 2027 tetap sekitar Rp1.474 triliun meski defisit primer menyempit. Ketika bunga menyerap porsi sebesar ini, dukungan BI menjadi sangat menarik bagi pemerintah.
- **Keterlibatan BI meluas dari stabilisasi pasar SBN ke penanggungan sebagian biaya program FLPP dan KDMP**, sementara penempatan kas Rp200 triliun disertai permintaan agar BI tidak menyerap kembali likuiditasnya. Biayanya tidak hilang, tetapi berpindah ke neraca bank sentral.
- **Meskipun Indonesia belum mengalami monetisasi utang ekstrem**, tetapi menunggu inflasi melonjak sebelum mengakui risikonya akan terlambat. Dukungan yang awalnya sementara mudah berubah menjadi kewajiban yang sulit dikurangi.

Sumber: Kemenkeu, BI, KSSK (diolah)

Ujian 2027: Tanggung Jawab Penyesuaian Harus Kembali pada Kredibiltas Fiskal

Pilihan Koordinasi Fiskal dan Moneter pada 2027		
Keadaan	**Konsekuensi**	**Respons kebijakan**
Penerimaan membaik, penyesuaian primer berjalan	Tekanan pembiayaan berkurang; dukungan BI dapat dikurangi bertahap	Jaga sebagian pemulihan penerimaan sebagai penyangga
Penerimaan meleset, bunga dan energi tetap mahal	Beban bunga, subsidi, dan kas saling menekan; tuntutan dukungan BI meningkat	Sesuaikan prioritas dan skala program; jaga respons BI terhadap inflasi dan rupiah
Dukungan dipertahankan lewat tekanan politik	Kepercayaan pada independensi BI melemah; premi risiko meniadakan penghematan	Batasi rekomendasi politik pada akuntabilitas mandat; lindungi pilihan instrumen moneter

- **Perubahan pengawasan dan kepemimpinan BI kini ikut dihitung pasar.** Rekomendasi DPR yang mengikat dan pergantian pimpinan di tengah tekanan rupiah membuat investor meminta kompensasi lebih tinggi. Pembelian SBN oleh BI pun belum mampu menahan kenaikan yield sepanjang 2026.
- **Skenario paling berisiko adalah ketika evaluasi politik dipakai untuk menahan biaya utang** tetap rendah atau menghalangi penyerapan likuiditas. Akibatnya bisa muncul belakangan lewat inflasi, pelemahan rupiah, dan bunga kredit yang ditanggung rumah tangga serta dunia usaha.
- **Penyesuaian harus dimulai dari anggaran:** komitmen program dalam kerangka pembiayaan multi-tahun, tenggat untuk burden sharing dan pertukaran SBN, penarikan kas yang bertahap dan terjadwal, serta pengawasan DPR yang berfokus pada akuntabilitas mandat, bukan pengendalian suku bunga.

Sumber: INDEF, Reuters, BI, KSSK (diolah)

Biaya Dana Naik Lebih Cepat dari Bunga Kredit, Kredit UMKM Tertinggal

Perubahan Suku Bunga, Des 2025–Agu 2026 (bps)

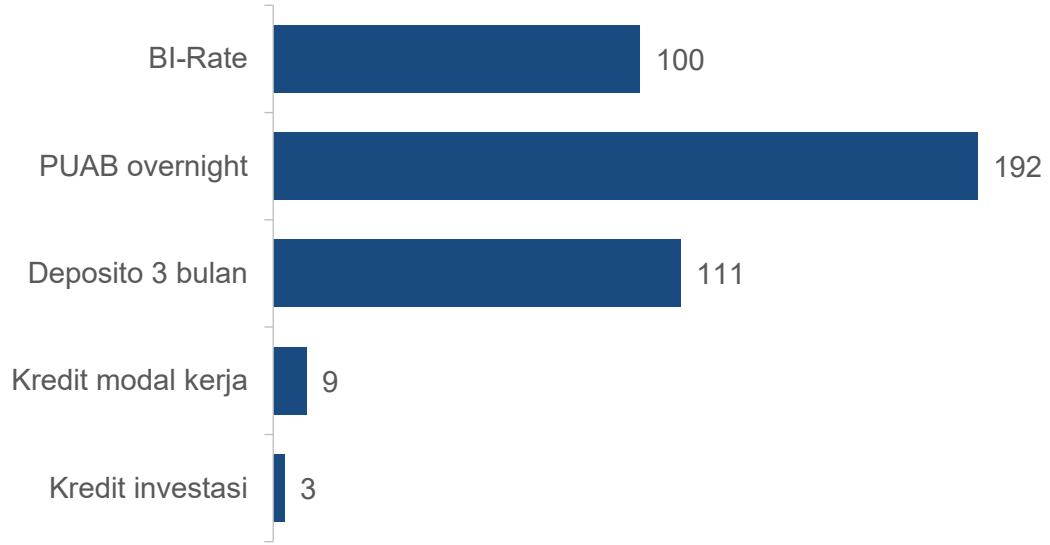

Pertumbuhan Kredit, September 2026 (% yoy)

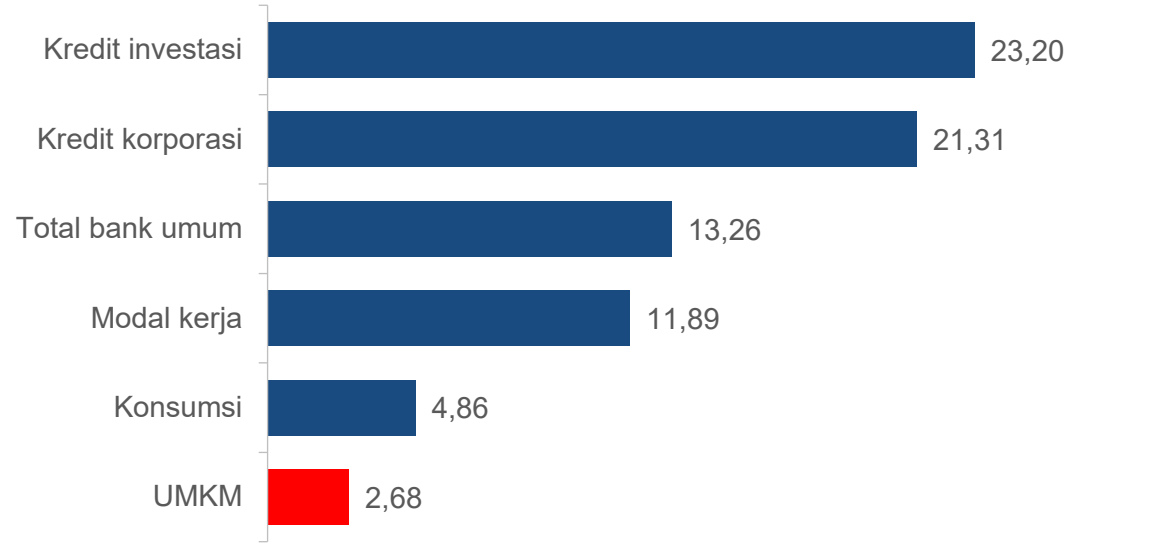

- **Kenaikan BI-Rate 100 bps langsung mengerek bunga pasar uang dan deposito, sementara bunga kredit hampir tidak bergerak.** Bank menanggung kenaikan biaya dana lebih dulu, dan tekanan ini lebih cepat terasa pada bank yang bergantung pada deposito.
- **Kredit tumbuh dua digit, tetapi bertumpu pada kredit investasi dan korporasi**. Kredit UMKM hanya tumbuh 2,68% karena kredit perdagangan terkontraksi, dan fasilitas yang belum ditarik mencapai sekitar Rp2.500 triliun dimana hambatannya ada pada permintaan dan kesiapan proyek, bukan semata likuiditas.
- **Penyangga likuiditas menipis karena DPK tumbuh jauh lebih lambat dari kredit.** Pelonggaran GWM dan penempatan dana pemerintah menambah dana bank, tetapi belum otomatis menurunkan bunga debitur; penarikan dana pemerintah perlu bertahap agar bank tidak berebut deposito mahal.

Sumber: BI, OJK, CEIC, KSSK (diolah)

Rupiah Bergantung pada Arus Portofolio, MSCI Menjadi Ujian Kepercayaan

Yield Obligasi Tenor 5 Tahun, 16 Oktober 2026 (%)

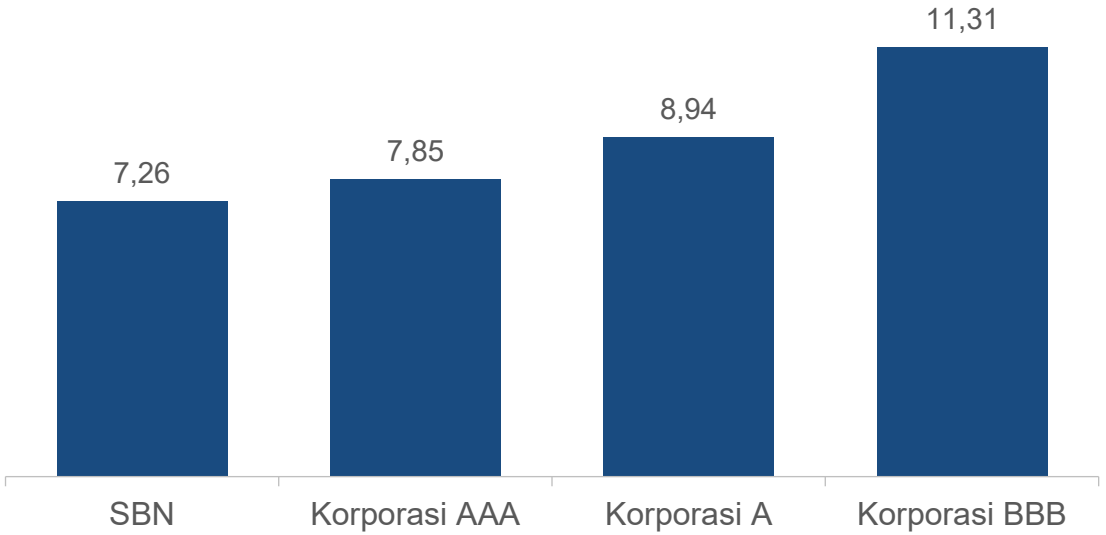

Lini Masa Konsultasi MSCI

15 Okt 2026
Konsultasi reklasifikasi Indonesia ke Standalone Market dibuka

30 Apr 2027
Batas akhir tanggapan; bukti perbaikan tata kelola dinilai

≤ 30 Jun 2027
Keputusan MSCI atas status pasar Indonesia

- **Rupiah melemah sekitar 10% sejak akhir 2024 hingga Oktober 2026, sementara ringgit dan baht menguat**. Perbaikan neraca pembayaran triwulan II lebih ditopang arus portofolio ketika transaksi berjalan justru memburuk, sehingga ruang penurunan BI-Rate terbatas selama bunga global tinggi.
- **Perusahaan menghadapi biaya pendanaan yang naik mengikuti yield acuan, terutama emiten berperingkat rendah.** Sekitar 74% dana yang dihimpun di pasar modal berupa surat utang, sehingga beban bunga dan refinancing ikut membesar.
- **MSCI menyoroti ketidakjelasan kepemilikan dan dugaan perdagangan terkoordinasi**. Sebelum April 2027, OJK, BEI, dan KSEI perlu menunjukkan kemajuan nyata soal free float, keterbukaan pemilik manfaat, dan penegakan aturan agar akses modal perusahaan tidak menyempit.

Sumber: BI, PHEI, OJK, MSCI (diolah)

Investasi Naik, tetapi Pekerjaan Formal dan Integrasi Rantai Nilai Tertinggal

Kandungan Nilai Tambah Asing dalam Ekspor, 2024 (%)

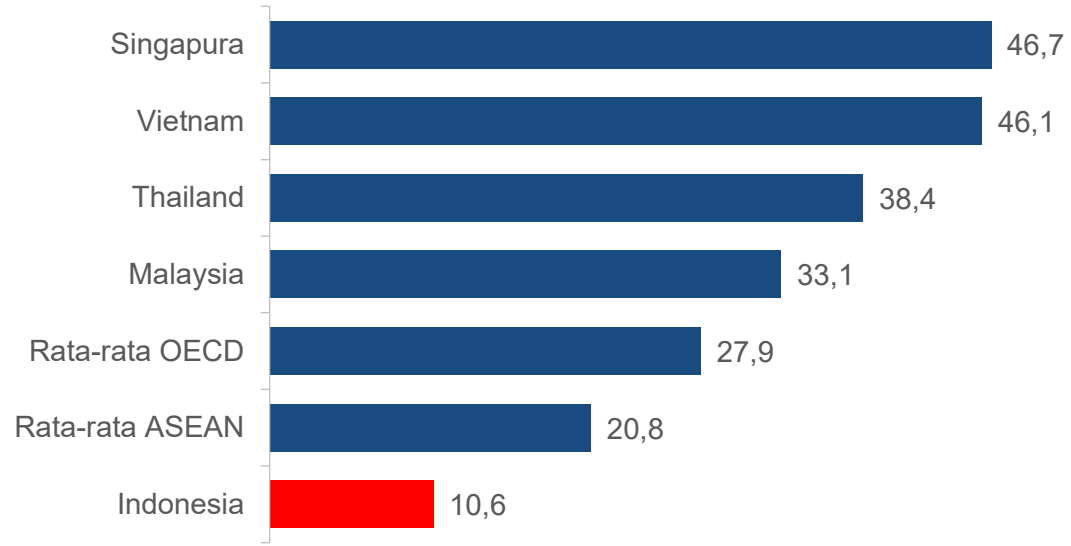

Jumlah Tenaga Kerja Terserap per Rp1 Triliun Investasi, Jan–Sep 2026

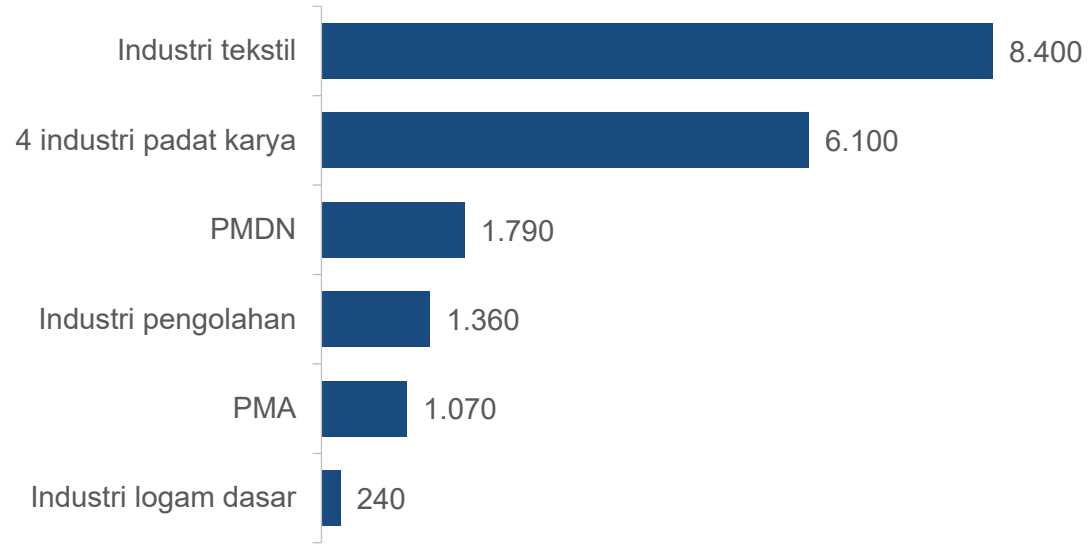

- **Ketahanan eksternal bertumpu pada surplus nonmigas,** sementara keterlibatan Indonesia dalam rantai nilai global masih dangkal. Kandungan nilai tambah asing dalam ekspor hanya 10,6%, terendah di ASEAN, karena ekspor didominasi komoditas yang minim input impor, bukan manufaktur berteknologi tinggi.
- **Realisasi investasi Januari–September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun (75,4% target),** tetapi dari 1,45 juta tambahan penduduk bekerja setahun terakhir hanya 0,41 juta yang masuk sektor formal. Porsi pekerja formal tertahan di sekitar 42%.
- **Masalahnya ada pada komposisi investasi,** seperti industri logam dasar menyerap 17,5% investasi tetapi hanya 2,9% tenaga kerja, sedangkan empat industri padat karya menyerap 16,8% tenaga kerja dengan 3,9% investasi. Insentif perlu dikaitkan dengan jumlah dan kualitas pekerjaan yang tercipta.

Sumber: BKPM, BPS, OECD TiVA (diolah)

Hilirisasi Menarik Modal, tetapi Daya Saing dan Produktivitas Justru Merosot

Investasi Hilirisasi per Komoditas, Jan–Sep 2026 (Rp Triliun)

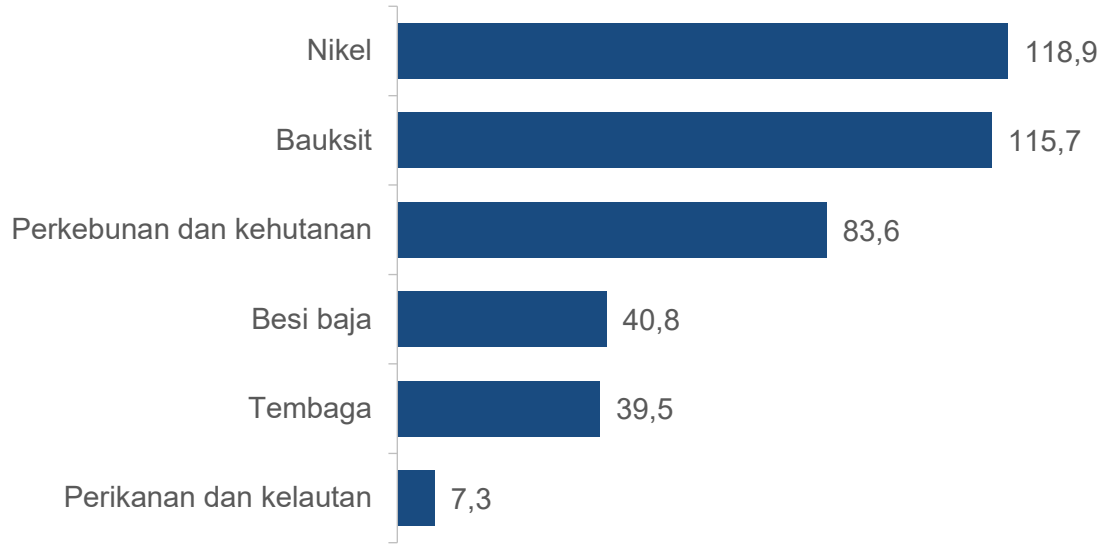

Peringkat Daya Saing IMD (Semakin Kecil Semakin Baik)

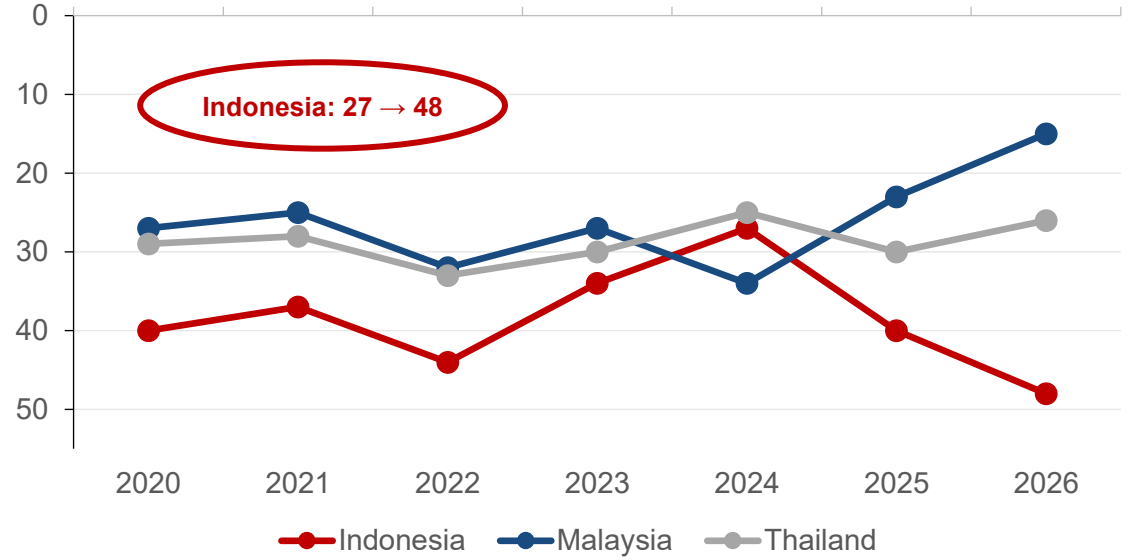

- **Hilirisasi menjadi penopang utama investasi** (31,2%) dan kanal utama modal asing, tetapi hampir 70% mengalir ke mineral. Nilai ekspor nikel olahan melonjak, namun lebih dari 75% kapasitas pemurnian dikuasai perusahaan China dan transfer teknologi masih sebatas aspek operasional.
- **Daya saing Indonesia merosot dari peringkat 27 (2024) ke 48 (2026),** kini di bawah Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Penurunan terdalam ada pada efisiensi bisnis, yang berakar pada produktivitas rendah: lebih dari separuh pekerja berada di sektor berproduktivitas rendah dan manufaktur menyusut.
- **Industri mulai pulih di akhir 2026 (PMI 54,0),** tetapi belum menambah pekerja dan masih bergantung pada bahan baku impor yang makin mahal. Gelombang AI belum memberi manfaat besar karena Indonesia belum masuk rantai pasoknya, sementara pusat data bersifat padat modal dan menuntut listrik serta air.

Sumber: BKPM, IMD, APO, World Bank (diolah)

Pertumbuhan 2027 Diproyeksikan 5,2%, Melambat setelah Dorongan Fiskal Usai

Sumber Pertumbuhan PDB (Poin Persentase)

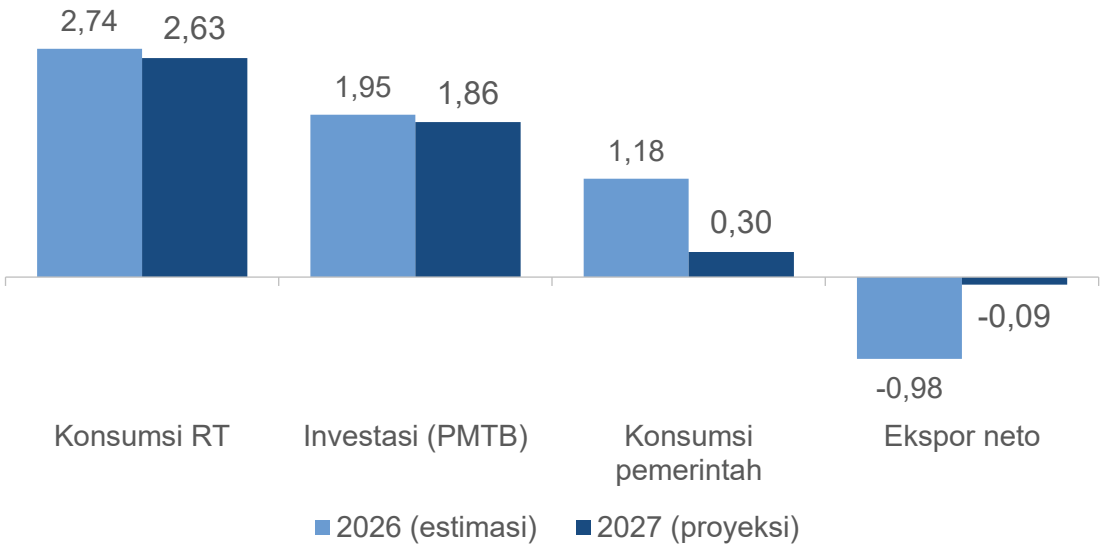

Proyeksi Pertumbuhan Indonesia 2027 (%)

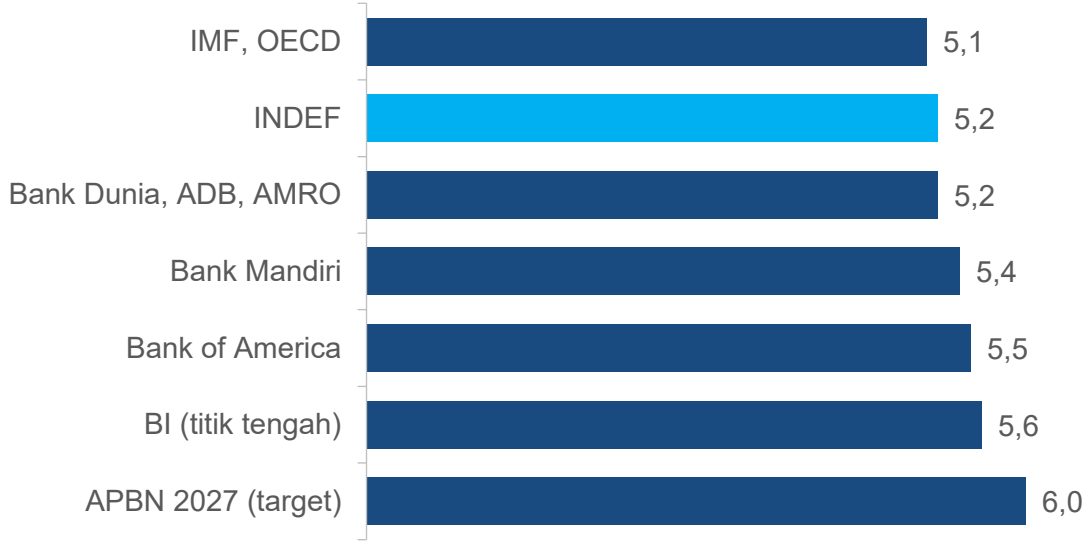

- **Konsumsi pemerintah melambat dari 15,58% ke sekitar 4%** karena MBG sudah berjalan penuh dan ruang fiskal tergerus bunga, sehingga kontribusinya turun sekitar 0,9 poin. Perbaikan ekspor neto mengompensasi hampir seluruhnya, sedangkan konsumsi rumah tangga dan investasi sedikit melambat akibat bunga tinggi dan rupiah lemah.
- **Proyeksi 5,2% sejalan dengan Bank Dunia, ADB, dan AMRO, serta konsisten dengan median model deret waktu 5,18%.** Target APBN 6,0% menuntut akselerasi yang jauh lebih kuat daripada yang diperkirakan lembaga mana pun.
- **Dari sisi penawaran, pertanian (2,3%) dan pertambangan (1,0%) tertahan El Nino dan produksi batu bara**, sementara industri tumbuh 5,1% dengan penguatan yang terkonsentrasi pada kegiatan padat modal. Pertumbuhan 5,2% lebih mencerminkan normalisasi setelah ekspansi fiskal 2026 daripada pelemahan fundamental.

Sumber: BPS, IMF, Bank Dunia, ADB, OECD, AMRO, BI (diolah); proyeksi INDEF

Inflasi 3,4% dan Rupiah Rp19.100: Tekanan Bergeser dari Pangan ke Harga Barang Impor

Inflasi Menurut Komponen (%, yoy)

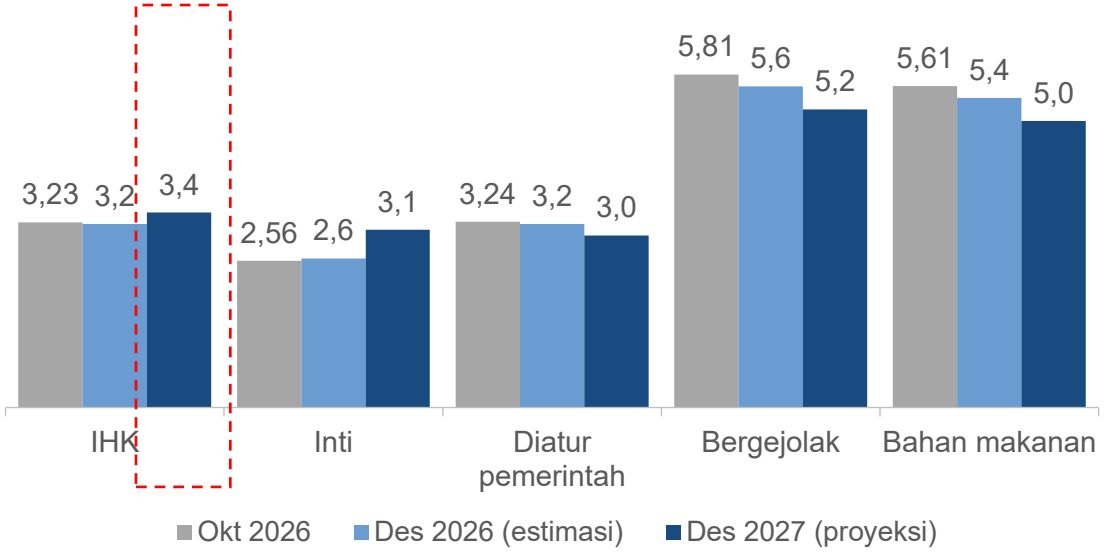

Rupiah Rata-rata 2027 (Rp per US$)

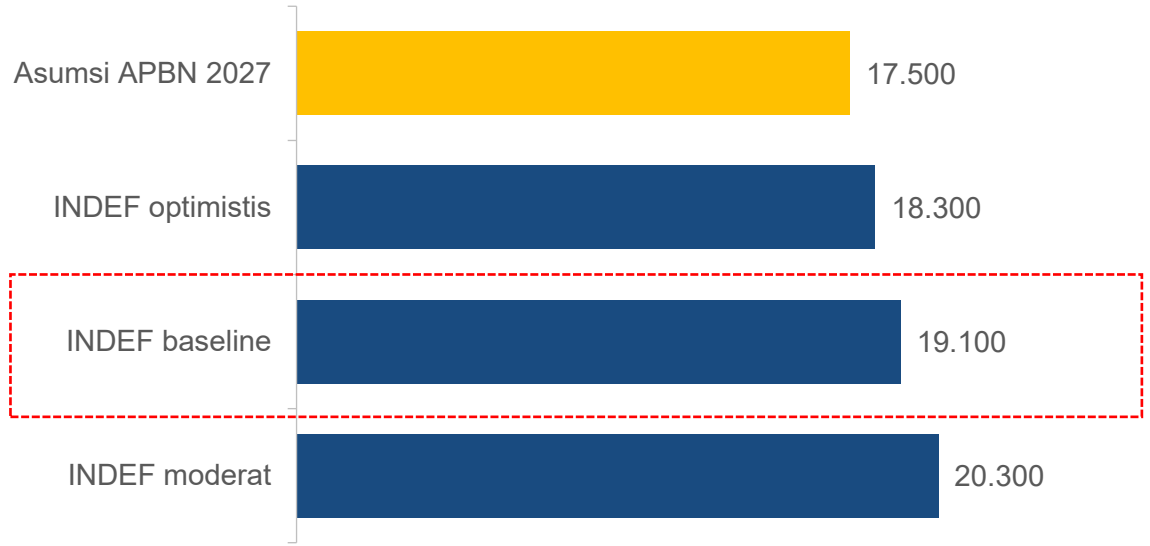

- **Inflasi akhir 2027 diproyeksikan 3,4%,** mendekati batas atas sasaran BI dan melampaui asumsi APBN 2,5%. Pangan tetap tinggi karena El Nino hingga triwulan I dan La Niña sesudahnya, sementara depresiasi rupiah sekitar 8,5% merambat ke barang impor sehingga inflasi inti naik ke 3,1%.
- **Rupiah diproyeksikan rata-rata Rp19.100, lebih lemah Rp1.600 dari asumsi APBN**. Penekannya terkonsentrasi di semester I: keputusan MSCI, bunga The Fed yang bertahan tinggi, persepsi risiko fiskal, arus keluar SRBI, dan tahun politik; normalisasi minyak pada semester II menjadi peredam.
- **Yield SBN 10 tahun diproyeksikan 7,4%, 50 bps di atas asumsi APBN, atau tambahan beban bunga sekitar Rp9 triliun**. Pembiayaan yang mahal mempersempit belanja produktif, sementara bagi industri, bahan baku impor yang lebih mahal menekan margin atau diteruskan ke harga konsumen.

Sumber: BPS, BI (diolah); proyeksi INDEF

Indikator Sosial Hanya Membaik Tipis, Skenario Moderat Menurunkan Pertumbuhan ke 4,7%

Indikator Sosial 2027			
Indikator	**2026**	**PEI 2027**	**APBN 2027**
TPT	4,75%	**4,70%**	4,30–4,87%
Kemiskinan	8,07%	**8,03%**	6,0–6,5%
Rasio Gini	0,368	**0,366**	0,360–0,367

Skenario Proyeksi 2027			
Indikator	**Moderat**	**Baseline**	**Optimistis**
Pertumbuhan (%)	4,7	**5,2**	5,4
Inflasi (%)	4,3	**3,4**	–
Rupiah (Rp/US$)	20.300	**19.100**	18.300
Pemicu utama	MSCI turun, minyak >US$110, gejolak politik	**Keputusan MSCI bertahap, minyak sekitar US$87**	Status EM bertahan, minyak <US$80

- **TPT diproyeksikan turun tipis ke 4,70% karena pertumbuhan melambat dan penciptaan kerja bergeser ke investasi serta ekspor yang padat modal**. Dengan setengah pengangguran 8,68% dan tambahan pekerjaan yang didominasi sektor informal, penurunan TPT belum cukup menjadi ukuran keberhasilan.
- **Kemiskinan hanya turun 0,04 poin ke 8,03%, jauh di atas sasaran APBN**. Inflasi bahan makanan 5,0% menaikkan garis kemiskinan lebih cepat dan puncak El Niño bertepatan dengan Susenas Maret 2027, sementara rasio Gini praktis tidak berubah.
- **Bila tekanan MSCI, energi, politik, dan iklim terjadi bersamaan**, pertumbuhan bisa turun ke 4,7%, inflasi naik ke 4,3%, dan rupiah melemah ke Rp20.300. Skenario optimistis 5,4% hanya tercapai bila perbaikan eksternal disertai pembenahan kelembagaan dan disiplin fiskal.

Sumber: BPS (diolah); analisis dan proyeksi INDEF

Ringkasan: Ekonomi 2027 Tetap Tumbuh, Seluruh Indikator 'Lebih Berat' dari Asumsi APBN

Ringkasan Proyeksi Ekonomi Indonesia 2027			
Indikator	**Realisasi 2025**	**APBN 2027**	**PEI 2027**
Pertumbuhan ekonomi (%, yoy)	5,11	6,0	**5,2**
Inflasi (%, yoy, akhir tahun)	2,9	2,5	**3,4**
Nilai tukar (Rp/US$, rata-rata)	16.478	17.500	**19.100**
Yield SBN 10 tahun (%, rata-rata)	sekitar 6,7	6,9	**7,4**
Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,85	4,30–4,87	**4,70**
Tingkat kemiskinan (%)	8,47	6,0–6,5	**8,03**
Rasio Gini	0,375	0,360–0,367	**0,366**

- **Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2027 diproyeksikan 5,2%,** melambat dari PEI estimasi 5,42% pada 2026 dan jauh di bawah target APBN 6,0%. Perlambatan terutama datang dari berakhirnya dorongan belanja pemerintah yang bersifat satu kali, sementara konsumsi rumah tangga dan investasi tertahan suku bunga tinggi dan rupiah yang lemah.
- **Inflasi 3,4%, rupiah rata-rata Rp19.100 per dolar AS, dan yield SBN 7,4%** menandakan biaya produksi dan pembiayaan tetap mahal. Selisih Rp1.600 dari asumsi kurs APBN berisiko memperbesar subsidi energi dan beban bunga.
- **Pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan diproyeksikan hanya membaik secara terbatas.** Namun, apabila tekanan pasar keuangan terkait MSCI, kenaikan harga energi, ketidakpastian politik, dan risiko iklim terjadi secara simultan, maka pertumbuhan ekonomi melambat dan kemiskinan meningkat.

Sumber: BPS, BI, Kemenkeu, proyeksi INDEF (diolah)

Agenda Kebijakan 2027: Kredibilitas Lebih Dulu, Kemudian Akselerasi

1 Kembalikan penyesuaian ke fiskal

Penerimaan realistis, efisiensi dan realokasi belanja ke program produktif, cadangan kas.

2 Jaga batas fiskal–moneter

Tenggat burden sharing dan pertukaran SBN; biaya program terbuka di APBN; lindungi keputusan BI.

3 Alirkan likuiditas ke sektor riil

Penarikan kas bertahap, pantau biaya dana dan bunga kredit baru, dan modal kerja UMKM berbasis arus kas.

4 Pulihkan kepercayaan pasar modal

Free float efektif, keterbukaan pemilik manfaat, dan penegakan aturan sebelum April 2027.

5 Arahkan investasi ke penyerapan tenaga kerja

Insentif terkait jumlah dan kualitas kerja, padat karya, hilirisasi ke industri turunan dan transfer teknologi.

6 Lindungi daya beli, bangun mesin baru

Stok dan distribusi pangan, perlindungan sosial tepat sasaran, kualitas SDM, infrastruktur, inovasi, dan institusi.

Sumber: Sintesis INDEF dari Bab I–VII

Terima Kasih

rizal@indef.or.id

